

# BAHASA, IDENTITAS, DAN KONFLIK

**Katubi**

*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

Di seluruh dunia negara-negara yang didirikan atas kesamaan bahasa telah koyak moyak oleh pertikaian religius, sementara lainnya, negara-negara yang dibangun di atas kesamaan agama, telah remuk-redam oleh konflik kebahasaan (Amin Maalouf 2001: 133).

## ABSTRACT

In popular observation, the relation between language and conflict to date is set aside. However, in various conflicting areas, linguistic conflicts are frequently taking place, for instance the disputes over the use of languages. In relation to identity construction, in a certain state, language policy is the heart of formation of national identity. Due to the important role of language, when language is related to some aspects of human life; language can be politicized as well as cause a conflict. This paper discusses a number of historical evidence about repression upon language due to the conflict, language conflict and national identity. Based on a number of historical evidences, it can be argued that a language can become a victim of conflict due to the assumption that language loyalty can overcome loyalty towards the state. At the same time, language can be utilized as a symbol of struggle in an effort to separate itself from the state. In addition it can also serve as a separating symbol among the conflicting groups. Language conflict can occur either in monolingual or multilingual communities. The heterogeneity and the similarity of language can be constructed to maximize language as a symbol of identity in line with socio-political changes accompanying the conflict.

Keywords: language conflict, identity, language politisation, language discrimination, language policy

## PENGANTAR

Kutipan pembuka di atas sama sekali tidak bermaksud mempertentangkan pentingnya bahasa dan agama dalam membangun dan mempertahankan berdirinya sebuah negara-bangsa. Kutipan pembuka itu juga tidak bermaksud membuktikan bahwa salah satu di antara keduanya—bahasa

dan agama—sebagai faktor penentu yang lebih besar dibanding yang lain. Kutipan itu bermaksud menegaskan pendapat Maalouf (2001: 133) yang menyatakan bahwa di antara semua pertalian kita yang bisa dikenali, bahasa nyaris selalu menjadi yang paling berpengaruh; hampir seberpengaruh agama, yang dalam satu pengertian telah menjadi pesaing utama sepanjang sejarah, meski kadang juga menjadi sekutunya. Ketika dua komunitas berbicara dengan menggunakan bahasa yang berbeda, agama yang sama tidak cukup mempersatukan mereka. Contohnya ialah pemeluk Katolik Fleming dan Wallon atau orang muslim Turki, Kurdi, dan Arab yang memiliki kesamaan bahasa, tetapi saling berusaha untuk meniadakan satu sama lain. Pada sisi lain, bahasa yang sama tidak juga menjadi jaminan untuk hidup saling berdampingan dalam kedamaian. Contohnya ialah umat Ortodoks Serbia, Umat Katolik Kroasia, dan umat Muslim di Bosnia; mereka menggunakan bahasa yang sama dalam satu kawasan, tetapi akhirnya tercerai-berai membentuk negara masing-masing pascaruntuhnya Yugoslavia.

Memang ada benarnya bahwa persekutuan yang bertahan selama berabad-abad telah dibentuk antara Islam dengan bahasa Arab, antara Gereja Katolik dengan bahasa Latin, antara Injil Luther dengan bahasa Jerman. Namun, ketika kedua unsur—bahasa dan agama—dihadapkan pada pembentukan negara-bangsa, ternyata tidak seperti yang terdapat dalam hubungan bahasa dan agama itu sendiri. Pencarian identitas nasional yang berbasis bahasa tampak pada awal berdirinya negara Israel. Orang-orang Israel menjadi sebuah bangsa hari ini, bukan hanya sekadar karena ikatan religius—sekuat apa pun itu—yang menyatukan mereka bersama, tetapi juga karena mereka berhasil menjadikan bahasa Ibrani modern sebagai bahasa asli nasional mereka. Padahal, bahasa Ibrani itu pernah mati ribuan tahun lalu dan bangsa Israel berhasil membangkitkannya demi sebuah identitas nasional. Menurut Fishman (1991), upaya pembalikan pergeseran bahasa dengan upaya penghidupan kembali bahasa Ibrani dilakukan dengan enam tindakan, yaitu (i) pembentukan rumah tangga berbahasa Ibrani yang pertama di rumah, (ii) pembentukan perkumpulan-perkumpulan tutur Ibrani, (iii) pembinaan bahasa Ibrani melalui kelas-kelas bahasa Ibrani di sekolah-sekolah, (iv) penerbitan surat kabar berbahasa Ibrani modern, (v) penyusunan kamus bahasa Ibrani kuno dan modern, dan (vi) pembentukan Dewan Bahasa.

Bahasa dalam beberapa kasus dapat menjadi pemicu konflik karena bahasa menjadi salah satu unsur untuk mengonstruksi identitas nasional atas berdirinya sebuah negara-bangsa. Karena itu, amat berbahaya memutuskan hubungan individu atau kelompok dengan bahasanya sekalipun bahasa itu merupakan bahasa minoritas dalam sebuah negara. Ketika tali tersebut putus atau rusak, reaksi yang berbahaya akan muncul sebagai respons atas usaha memisahkan bahasa dengan identitas. Maalouf (2001: 135) menyatakan bahwa fanatisme yang menumpahkan begitu banyak darah di Aljazair dapat terjadi lebih karena frustrasi kebahasaan dibanding keagamaan. Prancis tidak berbuat banyak untuk mengubah umat Muslim Aljazair menjadi umat Kristiani, tetapi Prancis memang dengan sengaja mencoba mengganti bahasa mereka dengan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Prancis karena ambisi pemerintah Prancis untuk “mengglobalkan” bahasa Prancis di dunia. Sayangnya, negara Prancis melakukan hal itu secara serampangan sehingga berakhir dengan terjadinya konflik berdarah.

Berbagai contoh itu menunjukkan bahwa bahasa mempunyai ciri luar biasa untuk menjadi komponen identitas dan sekaligus menjadi daya rusak luar biasa bagi sebuah negara-bangsa atas nama pembelaan identitas kelompok. Karena itu, ada hubungan bahasa, identitas, dan konflik. Sayangnya, jika kita membaca berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan konflik, jarang sekali ada yang membahas aspek bahasa dalam kajiannya. Artinya, aspek bahasa seolah-olah tidak ada hubungannya dengan konflik. Hal itu bisa dipahami karena bahasa terimplikasi secara inheren pada aktivitas sosial manusia dalam keseharian sehingga sulit diisolasi secara tersendiri sebagai sebuah variabel faktor penyebab khusus dalam konflik. Hal itu berbeda sekali dengan aspek ekonomi, misalnya.

Padahal, kalau dikaji lebih jauh, bahasa memiliki relevansi pembahasan dengan konflik. Chilton (1998: 2) mengemukakan contoh-contoh sebagai berikut untuk menunjukkan bahwa bahasa dan komunikasi memainkan beberapa peran dalam konflik.

- (i) Keputusan untuk memobilisasi kekuatan militer hanya dapat dilakukan melalui aktivitas verbal elite politik yang memiliki legitimasi untuk menyetujui perintah mobilisasi.

- (ii) Operasi militer itu sendiri hanya dapat digerakkan dan dilanjutkan oleh aktivitas verbal. Kedua contoh itu adalah kasus yang dalam linguistik disebut tindak tutur (speech acts)<sup>1</sup> (Searle 1996), aktivitas verbal yang secara aktual merupakan tindakan. Tindakan seperti itu difasilitasi oleh dan mereproduksi struktur kelembagaan.
- (iii) Kasus (i) dan (ii) di atas hanya dapat ada sebagai bagian dari struktur kebudayaan, sosial, dan politik yang memberi mereka legitimasi. Tentu saja yang merupakan legitimasi konsep "perang" hanya dapat ditetapkan dalam aktivitas kebahasaan. Struktur politik dan kelembagaan diberi kuasa dan diadakan oleh bentuk bahasa dan komunikasi. Bentuk sosial dan budaya yang melibatkan, baik dimensi kognitif maupun afektif, yang mendukung konsep legitimasi, patriotisme, pelanggaran yang diizinkan, patriarki, dan sebagainya ini juga bergantung pada bahasa dan komunikasi.
- (iv) Kasus khusus pada (iii) merupakan contoh historis dari propaganda dan dasar pembenaran dari perang. Peperangan, apakah antarnegara berdaulat atau perang saudara, dipicu oleh (iii), tetapi berbagai perang tertentu mendasarkan diri pada propaganda khusus untuk membenarkan adanya pengorbanan ekonomi dan kemanusiaan.

Tanpa berbagai faktor tersebut, perang tidak dapat dilaksanakan. Semua faktor tersebut dilakukan dalam bahasa dan komunikasi.

Pada sisi lain, Smith (1998: 18-19) memberikan beberapa bukti yang mengaitkan bahasa dan konflik. Bahasa merupakan pemarkah utama perbedaan antarindividu, antarkelompok, dan antarbangsa.

---

<sup>1</sup> Konsep tindak ujar (speech acts) pertama kali dikemukakan oleh Austin. Intinya, dalam semua tuturan terdapat unsur "berbuat" dan unsur "berkata" atau "doing things with words" Simpulan itu membawa Austin (1962: 94--108) ke suatu pemikiran pembedaan antara tiga tindak yang dilakukan seseorang ketika mengujarkan sesuatu. Pertama, tindak lokusi, yakni tindakan mengatakan sesuatu dengan kata atau kata-kata yang menurut tata bahasa dapat dimengerti dalam bahasa tertentu. Jadi, tindak ini kurang lebih dapat disamakan (sepadan) dengan menuturkan kalimat dengan makna dan acuan tertentu, yang kurang lebih sepadan dengan "makna" dalam pengertian tradisional. Kedua, tindak ilokusi, yaitu tindakan yang dilakukan dalam mengujarkan sesuatu, yang memiliki daya tertentu. Ketiga, tindak perlokusi, yaitu tindak yang mengacu kepada dampak atau efek yang ditimbulkan dengan menyatakan sesuatu. Pembagian seperti itu didasari oleh pendapatnya bahwa ketika penutur bertindak tutur, dia melakukan beberapa tindak. Jadi, Austin (1962: 120) membedakan tindak lokusi yang memiliki makna, tindak ilokusi yang memiliki daya tertentu untuk menggerakkan dengan menyatakan sesuatu, dan tindak perlokusi yang menghasilkan pengaruh tertentu dengan menyatakan sesuatu.

Menurut Searle (1969: 16), alasan dijadikannya tindak tutur sebagai pusat perhatian ialah semua komunikasi bahasa melibatkan tindak tutur. Unit komunikasi bahasa bukan simbol, kata, atau kalimat, atau bahkan token dari simbol, kata atau kalimat, tetapi lebih pada produksi simbol atau kata atau kalimat dalam performansi tindak tutur. Produksi token kalimat dalam keadaan tertentu merupakan tindak tutur dan tindak tutur adalah unit dasar dari komunikasi bahasa.

Berbicara tentang perbedaan mendorong dengan mudah ke dalam pembahasan perbedaan nasional. Bergerak dari perbedaan nasional ke kedudukan sebagai negara merdeka, dan juga nasionalisme, kita dengan sangat mudah menuju pembahasan konflik bersenjata. Jika konflik bersenjata menjadi titik pijaknya, seperti kita refleksikan pada hal yang dipertaruhkan dalam konflik di berbagai kawasan sekarang, pembahasan dapat menuju pada tuntutan kemerdekaan, pemisahan diri dari negara yang menaunginya atas dasar perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan bahasa atau membedakan diri melalui bahasa untuk simbol perjuangan. Dengan kata lain, kajian konflik dapat diarahkan pada kajian nasionalisme, identitas, dan bahasa.

Tulisan ini memaparkan sejumlah bukti sejarah adanya represi terhadap bahasa karena adanya konflik serta konflik bahasa dan identitas nasional. Karena itu, ancaman yang digunakan dalam tulisan ini bukanlah ancaman analisis wacana dalam situasi konflik, tetapi ancaman sosiohistoris politisasi bahasa dengan mengambil contoh peristiwa di beberapa negara. Ancaman ini pantas digunakan karena menurut Thornborrow (1999: 48), hak untuk menentukan bahasa dan pengakuan lewat bahasa seringkali berperan sangat penting dalam berbagai konflik sosial-politik yang terjadi di seluruh dunia.

#### REPRESI TERHADAP BAHASA PASCAKONFLIK: PELAJARAN DARI SEJARAH

Bahasa menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam negara-negara yang multilingual, terutama yang memiliki minoritas bahasa karena begitu eratnya hubungan bahasa dan identitas. Alasannya ialah bahasa dapat dijadikan alat politik untuk mencapai tujuan politis. Kenyataan menunjukkan bahwa bahasa dapat menjadi pokok ketidakpuasan bagi golongan minoritas yang menginginkan lebih banyak kekuasaan, kemerdekaan, atau penggabungan dengan negara tetangga dan hal itu menjadi masalah di banyak pemerintah. Bagi pemerintah yang tidak menganggap kenyataan ini sebagai sesuatu yang mengancam atau tidak diinginkan, pemerintah mungkin bersikap murah hati kepada kelompok minoritas bahasa itu atau bahkan mengabaikannya begitu saja. Sebaliknya, jika pemerintah menganggap kelompok minoritas bahasa secara potensial sebagai kaum subversif, pemerintah itu akan memberikan reaksi yang sangat lain. Dari segi pandangan pemerintah,

kekhawatiran itu dapat dibenarkan karena seringkali kesetiaan pada bahasa dapat menjadi senjata ampuh dan digunakan untuk kepentingan politik (Trudgill 1995: 220).

Dalam banyak hal, bahasa minoritas yang ditekan atau tidak digalakkan adalah juga bahasa dari negara tetangga yang mungkin bermusuhan. Hal itu terjadi pada bahasa Masedonia di Yunani atau bahasa Jerman di Prancis dan Italia. Yang dikhawatirkan adalah kesetiaan terhadap bahasa lebih kuat daripada kesetiaan nasional. Dalam hal-hal lain, bahasa minoritas yang tidak disenangi mungkin merupakan katalisator ketidakpuasan karena kelompok-kelompok minoritas sudah mempunyai satu alasan tambahan untuk merasa tidak puas dengan nasibnya.

Bahasa yang mengalami sejarah tekanan seperti itu ialah bahasa Katalan, suatu bahasa Romans yang hubungannya dengan bahasa Prancis dan bahasa Spanyol kira-kira sama eratnya. Bahasa ini mempunyai penutur sebanyak kira-kira 7 juta orang di Spanyol—di Katalonia dan Valensia dan Kepulauan Baleria—dan kira-kira 250.000 orang di Roussillon di Prancis, dan suatu kelompok yang sangat kecil di Pulau Sardinia. Bahasa ini merupakan bahasa-tulis pemerintahan yang resmi di Katalonia hingga daerah itu dicaplok oleh daerah Kastile pada awal abad ke-18. Pada tahun 1768, berdasar dekrit pemerintah, bahasa Spanyol mulai diajarkan di sekolah-sekolah yang dahulunya sekolah Katalan. Pada tahun 1856 ditetapkan suatu undang-undang yang menyatakan bahwa semua dokumen politik serta kontrak resmi harus menggunakan bahasa Spanyol. Penghapusan kebijaksanaan ini terjadi pada masa Republik Spanyol dari tahun 1931—1939. Anak-anak yang berbahasa Katalan diajar dengan bahasa Katalan, sedangkan anak-anak yang berbahasa Spanyol yang tinggal di daerah Katalan diberi kesempatan memulai pendidikannya dalam bahasa Spanyol dan pada usia sepuluh tahun masing-masing kelompok itu mempelajari bahasa yang satunya lagi.

Akan tetapi, di bawah pemerintahan Franco, bahasa Katalan sekali lagi dilarang sama sekali penggunaannya di sekolah-sekolah dan jabatan guru dalam bahasa dan sastra Katalan pada Universitas Barcelona dihapuskan. Buku-buku pegangan dalam bahasa Katalan menghilang dan anak-anak Katalan kembali harus memulai dan menyelesaikan pendidikannya dalam bahasa Spanyol. Para pendukung bahasa Katalan berpendapat bahwa pemerintah Franco pada dasarnya memiliki kepribadian "nasionalis Kastilia" dan jelas pemerintah Franco khawatir

atas apa yang dianggapnya sebagai kecenderungan separatis. Tentu saja itu bukan tanpa alasan. Bahasa adalah lambang identitas kelompok dan barang siapa berusaha menciptakan negara dengan bangsa tunggal yang bersatu, terutama tipe negara hukum Spanyol akan menganggap setiap isyarat identitas yang lain sebagai sesuatu yang berbahaya. Oleh sebab itu, penaklukan bahasa (atau penyatuannya, bergantung pada pandangan seseorang) merupakan strategi penting dalam pelaksanaan politik (atau penyatuannya).

Kedudukan bahasa Katalan dewasa ini menunjukkan bahwa keadaannya agak bebas. Namun, yang penting dari semua itu adalah bahasa Katalan masih tetap dilarang di sekolah-sekolah.

Alasan pendorong serupa terdapat juga dalam kasus pemerintah Inggris yang melarang bahasa Gael Skotlandia sesudah pemberontakan tahun 1745. Faktor serupa memengaruhi tindakan pemerintah Yunani yang antikomunis yang telah menjalankan politik "penyusunan" di Yunani Utara dengan jalan melarang penggunaan bahasa Masedonia (yang resmi digunakan di Yugoslavia komunis) di daerah itu.

Represi bahasa juga pernah terjadi di Indonesia.<sup>2</sup> Pemberontakan G.30.S pada 1965 menyebabkan terjadinya perubahan kondisi sosial politik yang sangat dahsyat di Indonesia. Bahkan, peristiwa itu memperuncing terjadinya konflik antargolongan, yang diikuti pembunuhan massal pada orang-orang yang diduga terlibat dalam pemberontakan itu. Kitamura (2010: 379—380) menjelaskan bahwa Soeharto menuduh PKI sebagai partai yang merancang kudeta 30 September 1965 dan membubarkan partai tersebut sebelum mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Soeharto menganggap bahwa hubungan kuat antara PKI dan RRC memiliki kaitan dengan aktivitas orang Cina di Indonesia sehingga berbagai kebijakan pun diambilnya. Kebijakan pertama yang dilakukan Soeharto berkaitan erat dengan bahasa, yaitu pada tahun 1966 menutup sekolah bahasa Cina dan membredel koran berbahasa

---

<sup>2</sup> Sejumlah penulis sudah membahas masalah bahasa Cina di Indonesia seiring dengan pasang surutnya kehidupan sosial politik. Thung Ju Lan (2010) menulis "Orang Cina dalam Bahasa Politik Orde Baru." Koji Tsuda (2010) menulis "Etnik Tionghoa yang Belajar Bahasa Mandarin: Pencarian Kecinaannya?" Francisca Handoko (2010) menulis "Perjalanan Bahasa Mandarin dalam Dunia Pendidikan di Indonesia." Yumi Kitamaru (2010) menulis "Pemakaian dan Perubahan Bahasa Cina dalam Linguistic Landscape di Jakarta." Fokus kajian antarpemulis tersebut memang berbeda-beda. Namun, ada kesamaan di antara kajian mereka, yaitu peristiwa politik peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru yang didahului terjadinya pemberontakan G.30.S telah mengubah kebijakan negara terhadap bahasa Cina di Indonesia.

Cina, kecuali sebuah koran yang berhubungan dengan pemerintah, yaitu *Harian Indonesia*.<sup>3</sup> Mulai 1978 impor buku-buku terbitan berbahasa Cina dilarang<sup>4</sup> dan mulai 1988 papan reklame dan pemasangan iklan berbahasa Cina juga dilarang.<sup>5</sup> Kebijakan itu berarti bahwa pascakonflik antargolongan di Indonesia pada 1965, orang Cina dipaksa untuk tidak menunjukkan identitas kecinaannya di depan publik (Tsuda 2010: 309).

Berbagai contoh peristiwa sejarah di atas menunjukkan bahwa salah satu unsur identitas yang langsung dilarang penggunaannya oleh berbagai rezim pemerintahan pascaterjadinya konflik dalam negara atau antarnegara ialah bahasa. Alasannya adalah bahasa memainkan peran dalam mengekspresikan solidaritas dan mengonstruksi identitas untuk menggalang loyalitas kebahasaan. Padahal, loyalitas kebahasaan yang ditunjang oleh daya dorong politik dalam beberapa kasus mampu mengalahkan loyalitas kepada negara. Dalam hal lain, bahasa minoritas yang tidak disenangi mungkin merupakan katalisator ketidakpuasan karena kelompok minoritas sudah mempunyai satu alasan tambahan untuk merasa tidak puas dengan nasibnya.

#### KONFLIK BAHASA DAN IDENTITAS NASIONAL

Bahasa bukan sekadar mengemban fungsi wahana interaksi semata, tetapi juga fungsi lain dalam kehidupan manusia. Salah satunya ialah mengemban fungsi wahana nilai simbolik. Dengan mengadopsi bahasa tertentu, sebuah kelompok, sebuah bangsa, atau sebuah negara mendeklarasikan identitas yang ingin ditunjukkan sebagai "diri" yang berbeda dengan "liyan."

Even-Zohar (1997: 1) menyatakan bahwa sebagian besar kasus konflik bahasa menunjukkan banyak kesamaan, yaitu dimulai dari ketidaksetujuan antarkelompok dalam satu bangsa atau satu negara tentang "bahasa apa yang harus ada dalam bangsa dan negara itu." Hasilnya ialah bahasa tertentu atau ragam bahasa tertentu, yang didukung oleh kelompok tertentu dan juga ditentang oleh kelompok

---

<sup>3</sup> Tap MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pers.

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/KP/XII/1978 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan, dan Mengedarkan Segala Jenis Barang Cetak dalam Huruf /Aksara dan Bahasa Cina.

<sup>5</sup> Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 02?SE/Ditjen/PPG/K/1988 tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa China.



lain. Kasus seperti itu terjadi antara bahasa Hindi versus Urdu, Ibrani versus Yiddish, Norwegian Riksmål versus Landsmål, Serbia versus Croatia, Prancis versus Occitan, bahasa Jerman ragam tinggi versus bahasa Jerman ragam rendah, Ortografi Prancis dan Rusia sesudah revolusi Prancis dan Rusia, Spanyol dan Guarani, dan sebagainya.

Untuk menggambarkan hal itu, di bawah ini dipaparkan dua contoh yang terjadi di Norwegia dan di Algeria. Contoh kasus dari Norwegia ini berdasar tulisan Haugen (1966) dan Trudgill (1998) dan contoh kasus dari Algeria berdasar penelitian Mouhleb (2005).

### Kasus di Norwegia

Dalam bahasa Norwegia dewasa ini terdapat dua bahasa Norwegia standard yang resmi. Keadaan ini tampak agak ganjil bagi suatu negara yang berpenduduk kurang dari empat juta jiwa. Kedua bahasa standard dikenal dengan nama Nynorsk 'bahasa Norwegia baru' dan Bokmal 'bahasa buku'.<sup>6</sup> Keduanya memiliki kedudukan resmi yang sama. Dengan kata lain, hubungannya bukanlah hubungan diglosia.<sup>7</sup> Bahasa Bokmal adalah bahasa pers nasional (walaupun beberapa surat kabar

---

<sup>6</sup> Norwegia sebenarnya mempunyai dua nama dalam bahasa Norwegia, yaitu *Noreg* dalam bahasa Nynorsk dan *Norge* dalam bahasa Bokmal.

<sup>7</sup> Istilah *diglosia* pertama kali digunakan oleh Charles Ferguson pada tahun 1958. Menurut dia, istilah *diglosia* dimaksudkan untuk memberi gambaran keadaan, yakni dua variasi dari satu bahasa hidup berdampingan di dalam suatu masyarakat dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Istilah itu digunakan karena istilah kedwibahasaan (bilingualisme) dirasakan kurang tepat untuk menggambarkan gejala seperti itu. Ferguson mengambil contoh situasi di Arab untuk menggambarkan pemilahan peran. Di Arab terdapat dua variasi bahasa Arab, yaitu bahasa Arab Klasik yang dianggap sebagai bahasa standard dan dipergunakan untuk keperluan resmi serta bahasa Arab kolokial (pergaulan) sebagai bahasa substandard yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Pengertian diglosia seperti itu, menurut Holmes (1997), merupakan diglosia dalam arti sempit, yang memiliki tiga ciri penting, yaitu

- (i) dua ragam berbeda dari bahasa yang sama digunakan dalam masyarakat, salah satunya dianggap sebagai ragam tinggi (RT) dan ragam rendah (RR);
- (ii) tiap ragam digunakan untuk fungsi yang cukup berbeda; namun RT dan RR saling melengkapi;
- (iii) tidak ada seorang pun menggunakan RT dalam percakapan tiap hari.

Konsep diglosia itu akhirnya meluas. Hal itu tampak dalam pendapat Fishman (1972), yang menyatakan bahwa diglosia dipergunakan untuk melukiskan keadaan masyarakat dari suatu bangsa yang menggunakan dua bahasa atau dialek yang berlainan dan yang paling penting ialah dua bahasa atau dialek itu memainkan peran masing-masing dalam masyarakat yang bersangkutan. Pada hakikatnya diglosia ialah suatu gejala yang bertalian dengan masyarakat yang menggunakan dua bahasa (atau lebih) untuk berkomunikasi di antara sesama anggotanya.

Berdasar pernyataan itu, pengertian diglosia tidak lagi terbatas pada situasi pemakaian dua variasi bahasa dari satu bahasa dalam suatu masyarakat seperti yang dikemukakan Ferguson, tetapi termasuk juga pemakaian dua bahasa (atau lebih) atau pemakaian dua dialek atau lebih dalam masyarakat yang sama. Sementara itu, aspek pemilahan peran masing-masing bahasa (dialek), tampaknya tetap dipertahankan dan telah disepakati bersama. Jadi, terdapat pemilahan bahasa, yaitu adanya ragam bahasa yang dianggap "tinggi" (T) dan ragam bahasa yang dianggap "rendah" (R).

memuat karangan dalam bahasa Nynorsk), bahasa sejumlah besar buku, terutama terjemahan, dan bahasa sejumlah besar anak sekolah sebagai bahasa pengantar. Bahasa Nynorsk digunakan dalam pers setempat, terutama di bagian barat negara itu; bahasa itu adalah bahasa sekolah kira-kira 20% anak-anak dan dipakai dalam sejumlah besar puisi serta sastra, terutama dalam karya-karya yang mempunyai latar belakang perdesaan. Semua surat resmi ditulis dalam kedua ragam standard itu; anak-anak harus belajar membaca dan menulis dalam kedua ragam bahasa itu dan keduanya digunakan secara luas dalam siaran radio dan televisi. Dalam setiap daerah dewan-dewan setempat menentukan ragam mana yang dipakai pada pengumuman dan ragam standard yang akan digunakan dalam setiap daerah sekolah juga diputuskan melalui tatacara demokratis.

Dari segi linguistik, kedua bahasa itu benar-benar sama dan kedua kelompok pengguna bahasa tersebut secara sempurna dapat saling memahami antarpenggunaan bahasa yang satu dengan yang lain. Di samping itu, dikotomi tadi lebih menyangkut bahasa standard tulis daripada bahasa lisan. Banyak penduduk menggunakan dialek perdesaan atau dialek perkotaan nonstandard walaupun dialek-dialek bagian Barat cenderung lebih menyerupai bahasa Nynorsk dan beberapa dialek bagian Timur lebih menyerupai bahasa Bokmal. Akan tetapi, dari segi sosiolinguistik, barangkali perbedaan dalam bahasa-bahasa itu lebih menarik daripada perbedaan antara kedua bahasa itu. Dalam kedua bahasa Bokmal dan Nynorsk terdapat varian-varian (kata-kata, ucapan, serta konstruksi tata bahasa pengganti) yang dikenal sebagai radikal dan konservatif. Dalam hal bahasa Bokmal, surat-surat kabar sayap kanan cenderung menggunakan bentuk radikal. Sering juga kita dapat menerka dengan tepat haluan politik penutur yang terpelajar berdasar bentuk-bentuk yang dipakainya. Keterlibatan bahasa dalam politik yang secara luar biasa mengambil bentuk yang nyata berarti bahwa kurang sekali orang Norwegia yang bersikap objektif terhadap sikap kebahasaan di negara ini dan bahwa "masalah bahasa" memang sering diperdebatkan bahkan menimbulkan ketegangan yang memicu konflik. Panasnya perdebatan itu dapat dinilai dari kenyataan bahwa pada tahun 1955 seorang peramal cuaca pada siaran radio Norwegia menjadi terkenal sebagai "manusia salju yang sangat buruk" dan orang ini benar-benar dipecat dengan tidak hormat karena menolak mengatakan *sno* (bentuk radikal bahasa Bokmal), yang berarti 'salju'

sebagai pengganti *sne* (bentuk konservatif).

Situasi di Norwegia ini sungguh luar biasa dan dapat dirasa sungguh "amat janggal" karena dalam negara yang berpenduduk sedikit harus mencetak buku sekolah dan surat-surat resmi dalam dua bahasa dan keharusan mengajarkan kedua bahasa itu bagi murid-murid di sekolah.

Untuk menjelaskan kondisi itu, diperlukan upaya menelusuri kembali sejarah Norwegia pada masa silam. Sejak abad ke-15 hingga 1814 Norwegia diperintah oleh Denmark. Selama masa itu satu-satunya bahasa resmi ialah bahasa Denmark yang mengakibatkan dialek-dialek bahasa Norwegia menjadi bermacam-ragam dalam hubungannya dengan bahasa Denmark standard. Hal itu dimungkinkan terjadi karena bahasa Denmark banyak sekali persamaannya dengan bahasa Norwegia. Karena itu, ketika Norwegia memperoleh kemerdekaan dari Denmark pada tahun 1814 tidak ada bahasa Norwegia standard yang khusus. Sejumlah kecil imigran benar-benar memakai bahasa Denmark yang juga digunakan di gedung teater, sedangkan bahasa resmi pegawai negeri pribumi sebenarnya adalah bahasa Denmark dengan lafal Norwegia. Begitu pula cara mengajarkan membaca di sekolah-sekolah. Wicara informal penutur kelas atas adalah sejenis kompromi antara ragam bahasa tadi dengan ragam-ragam bahasa setempat. Bahasa tersebut adalah sejenis dengan bahasa Norwegia yang dipengaruhi Denmark yang agak seragam. Penutur kelas bawah di kota menggunakan dialek Norwegia yang barangkali agak dipengaruhi bahasa Denmark, sedangkan petani menggunakan dialek perdesaan bahasa Denmark.

Ada dua tanggapan berkaitan dengan pembentukan bahasa nasional Norwegia. *Pertama*, strategi dengan mengubah bahasa Denmark secara berangsur-angsur menuju ke arah bahasa kelas atas penduduk kota yang menggunakan bahasa Denmark yang dipengaruhi bahasa Norwegia. Bahasa Dano-Norwegia ini kemudian dikenal sebagai bahasa Riksmål (bahasa negara) dan merupakan pelopor bahasa Bokmal. *Kedua*, strategi yang lebih revolusioner dan merencanakan sendiri suatu bahasa berdasar kajian dialek yang ada di Norwegia. Bahasa itu dirancang berdasar dialek-dialek perdesaan, terutama dialek-dialek Barat yang dianggap kurang mengalami kerancuan dari bahasa Denmark dan diberi nama bahasa Landsmal 'bahasa perdesaan', yang kemudian menjadi bahasa Nynorsk. Sebagai reaksi terhadap perasaan nasional

yang bermacam-macam, pada 1885 bahasa Landsmal dijadikan bahasa resmi dengan kedudukan yang sama dengan bahasa Denmark (atau bahasa Riksmal). Akan tetapi, pemerintah tidak kuasa menghapuskan bahasa Dano-Norwegia karena bahasa itu masih dipakai oleh golongan elite kota yang berpengaruh. Pada hakikatnya kedudukan bahasa Dano-Norwegia diperkuat ketika pada tahun 1887 guru-guru diperintahkan untuk tidak mengajarkan lafal bahasa Denmark, tetapi lafal standard ragam lisan, yakni bahasa Riksmal Dano-Norwegia yang telah diubah.

Asal mula bentuk-bentuk konservatif dan radikal dalam kedua bahasa resmi itu terletak pada keinginan pemerintah yang silih berganti untuk membentuk satu bahasa nasional daripada dua bahasa tanpa menghapuskan salah satu di antara kedua bahasa itu. Sebaliknya, diinginkan untuk berangsur-angsur mengubah kedua bahasa itu menuju penyatuannya.

Pada tahun 1917 pemerintah memperkenalkan pembaruan resmi. Salah satu pengaruhnya ialah tercapainya persesuaian antara kedua bahasa berkenaan dengan pokok ini dan pokok lainnya. Perkembangan penting berikutnya ialah pembaruan pada 1938 yang didasarkan pada laporan panitia yang bertugas "menyesuaikan kedua bahasa dalam hal ejaan, bentuk kata, dan infleksi berdasar bahasa rakyat Norwegia." Secara implisit mereka diperintah untuk tidak mengambil wicara kelas atas sebagai bahasa standard. Hal itu merupakan tindakan yang luar biasa berani dalam sejarah standardisasi bahasa. Pelaksanaan pembaruan ini tertunda oleh peperangan. Tetapi, sesudah perang buku-buku sekolah mulai diterbitkan dengan standard baru. Berbagai perubahan dalam bahasa Bokmal membangkitkan reaksi marah di pihak penutur kelas atas dan banyak penutur kelas menengah di bagian Timur. Banyak orang tua, terutama di Oslo, menganggap bentuk-bentuk baru ini kasar dan mereka berkeberatan terhadap kenyataan seperti itu. Oleh sebab itu, selama awal tahun 1950-an perusahaan-perusahaan dagang besar dan ahli-ahli politik konservatif membiayai kampanye besar-besaran yang luas dan masif menentang pembaruan itu. Perdebatan sengit pun terjadi. Bahkan, konflik antarkelompok nyaris berakhir ke arah terjadinya kekerasan fisik.

Oposisi antarkedua kelompok terus berlanjut. Pemerintah membentuk Komisi Bahasa dengan tugas mengawasi norma buku-buku sekolah bagi kedua bahasa. Golongan sayap kanan mengganggu komisi ini melakukan

”pengesahan kekasaran” dan golongan sayap kiri menganggapnya ”kemenangan bagi demokrasi.” Pada tahun 1949 norma buku sekolah diterbitkan. Akibatnya, dewasa ini terdapat tiga jenis bentuk dalam buku sekolah dalam kedua bahasa Bokmal dan Nynorsk.

### **Kasus di Algeria**

Negara Algeria adalah salah satu negara terbesar di Timur Tengah dan wilayah Afrika Utara dengan penduduk sekitar 32,3 juta (pada tahun 2005). Negara Algeria berdiri pada tahun 1962 setelah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Prancis. Isu identitas nasional telah menjadi politik negara yang paling utama sejak kemerdekaan dan berfungsi sebagai faktor pelegitimasi utama rezim pemerintahan.

Algeria mendefinisikan diri sebagai bagian dari Arab dan dunia Muslim. Mayoritas penduduknya (sekitar 72%) adalah penutur bahasa Arab dan berbicara bahasa Arab ragam keseharian. Sementara itu, minoritas komunitas bahasa Berber (sekitar 27%) berbicara dalam kurang lebih dua belas dialek Berber. Sekitar 67% penduduk Algeria mengetahui dan dapat menggunakan bahasa Prancis karena sejarah kolonialisme. Hanya saja bahasa formal yang diakui oleh negara adalah bahasa Arab standard dalam bentuk modernnya, yang digunakan dalam media, sebagian besar publikasi, dan pembicaraan resmi. Ragam bahasa Arab klasik digunakan dalam aspek keagamaan dan kesastraan. Bahasa Arab dan Berber bukanlah bahasa yang bisa saling dipahami (*mutually intelligible*). Sejak kemerdekaan, Algeria merancang program arabisasi dengan tujuan mengurangi atau bahkan kalau bisa menghilangkan pengaruh Prancis.

Identitas Berber di Algeria merupakan pertanyaan utama dalam keseharian. Agama, yang sering digunakan untuk membedakan antarkelompok, bukan pemarah kelompok etnis di Algeria. Sebagian besar penduduk Algeria adalah Muslim Suni dan orang-orang yang ikut dalam aliran lain tidak dikaitkan dengan kelompok etnis tertentu. Dalam upaya membedakan orang Berber dari orang Arab, bahasa adalah sebutan persamaan yang paling tersedia sehingga kita dapat mengatakan penutur Arab dan penutur Berber.

Wilayah Kabyle mengembangkan organisasi politik yang kuat pascaera perang dan dalam konteks ini bahasa Berber menjadi simbol oposisi

yang kuat. Bagi orang Kabylia, bahasa Arab yang sangat dominan selalu dikaitkan dengan program arabisasi negara dan agenda kelompok Islam yang dianggap merepresentasikan ancaman terhadap kebudayaan Kabyle.

Pada April 2001 wilayah Berber, Kabyle, di negara Algeria meletus serangkaian kekerasan dan kerusuhan yang mengakibatkan meninggalnya 123 masyarakat sipil. Kerusuhan bermula di Kabylia, tetapi meluas sampai di kota-kota Algeria Barat dan Timur pada Juni 2001. Peristiwa itu pada awalnya dipandang sebagai ketegangan antarkelompok etnis semata, tetapi tiba-tiba berubah dengan mengambil agenda sosiopolitik. Mouhlebl (2005) menganalisis bagaimana aktivis politik Kabyle menggunakan tuntutan untuk status resmi bahasa Berber (terutama dialek Thamazight), sederajat dengan bahasa Arab dalam agenda perubahan politik dan demokratisasi, tetapi juga dalam usaha memengaruhi konsep kealgeriaan yang ditentukan oleh negara yang dikaitkan erat dengan bahasa dan kebudayaan Arab. Tuntutan pengakuan bahasa-budaya dan demokrasi tidak jauh dari tuntutan gerakan kaum Berber. "Proyek Kabyle" merepresentasikan tidak hanya tuntutan pengakuan hak bahasa dan budaya di wilayah Kabylia dan di antara kelompok-kelompok Berber Algeria, tetapi juga pengakuan identitas Berber sebagai dasar untuk mengkonstruksi identitas Algeria yang lebih baru untuk menggantikan identitas Arab nasional yang "didefinisikan" oleh negara. Menurut Mouhlebl (2005: 8)

*In this region language is a definite and prevalent marker. State arabicization programs have contributed to politicizing language and the Berberist movement has from the beginning in the 1940s had a focus on language issues. In view of this, language is not only the marker that most clearly distinguishes the Berbers from the Arabs in Algeria; it is also one of the central issues in the conflict between the Berberist movement and the state.*

Bahkan, menurut Abd al-Rizag al-Durari dalam Mouhlebl (2005: 14) masalah krisis identitas nasional yang melanda Algeria pada saat ini adalah

*".....brought on by the regime's unwillingness to deal with the linguistic realities present in the country and its vernaculars, or the local languages ('alsinatuhum al-mahalliya). Instead, they pursued the generalization and use of a school Arabic (al-luga al-'arabiyya al-madrasiiyya).*

Setelah kerusuhan itulah untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, negara berpartisipasi dalam debat pluralisme kebudayaan Algeria daripada secara konsisten menolak tuntutan kelompok Berber sebagai upaya neokolonial untuk memperlemah kesatuan dan kedaulatan nasional.

Pada tahun 2002, bahasa Berber atau Thamazight diakui statusnya sebagai bahasa nasional. Namun, pengakuan sebagai bahasa nasional itu belum cukup bagi kelompok gerakan Berber, yang tetap menuntut pengakuan untuk bahasa Berber setara dengan bahasa Arab, yaitu sebagai bahasa resmi.<sup>8</sup> Pada kenyataannya, pengakuan terhadap bahasa Berber itu hanyalah sekadar pengakuan formal karena bahasa Arab tampak menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi tunggal di Algeria.

Kasus di Algeria itu menunjukkan bahwa sulit menetapkan bahwa faktor etnik sendiri merupakan faktor yang memotivasi terjadinya konflik. Karena itu, kombinasi gerakan kelompok Berber tentang tuntutan kebahasaan berkembang ke dalam tuntutan untuk demokrasi bukanlah hal yang mengejutkan. Holt (1996: 22) menulis loyalitas yang terbagi dalam dunia Arab bahwa *“when the mismatch between state and linguistic identity is combined with dynastic regimes and almost complete lack of popular participation in the political process, then it is easy to see why such states are facing a crisis of legitimacy.”* Negara Algeria sendiri membuat dirinya begitu mudah diserang berbasis proyek bahasa dan budaya maupun proyek konstruksi etnisitasnya dengan membuat beberapa komunitas bahasa merasa didiskriminasi atau dieksklusi dari agenda nasional negara.

Islamisme di Algeria dikembangkan oleh negara sebagai salah satu dasar legitimasinya. Dasar legitimasi lain di Algeria ialah bahasa dan identitas. Menurut Mouhleb (2005: 94), ada kombinasi program tuntutan budaya-bahasa dan demokrasi sekuler. Surat kabar nasional sebagian besar memusatkan perhatian pada keluhan ekonomi dan sosiopolitik,

---

<sup>8</sup> Pembedaan antara bahasa nasional (*national language*) dan bahasa resmi (*official language*) pada umumnya dilakukan berdasar dimensi afektif-referensial atau lebih tepatnya dalam konteks ini dilakukan berdasar dimensi ideologis-instrumental. Bahasa nasional ialah bahasa dari unit sosial, budaya, dan politis. Pada umumnya, bahasa nasional dikembangkan dan digunakan sebagai simbol kesatuan nasional yang berfungsi untuk mengidentifikasi kebangsaan dan kesatuan masyarakat dari suatu bangsa. Sementara itu, bahasa resmi ialah bahasa yang digunakan untuk urusan pemerintahan. Fungsi bahasa resmi pada dasarnya ditinjau dari segi kebermanfaatannya daripada simbolik. Namun, tentu saja satu bahasa dapat melayani kedua fungsi itu.



tetapi berbagai pernyataan dan simbolisme protes di wilayah Kabyle memiliki unsur kebudayaan dan kebahasaan yang menonjol. Karena itu, pendefinisian konflik dengan hanya mendasarkan diri pada salah satu aspek dengan menafikan aspek lain merupakan wujud penyederhanaan masalah.

Menurut Morsly (dalam Mouhle 2005: 94), tuntutan pengakuan bahasa Berber sebagai bahasa resmi sejajar dengan bahasa Arab merupakan kontestasi atas terjadinya penyeragaman bahasa dan kontestasi penyeragaman identitas yang disetujui negara. Identitas yang disetujui negara tersebut menjadi dasar legitimasi rezim pemerintah. Artinya, melalui tuntutan pengakuan etnolinguistik itu, kelompok Berber menantang negara untuk meredefinisi kembali dasar legitimasinya.

Suleiman (1999, 2004) menyatakan hal senada bahwa di beberapa bagian dunia Arab, bahasa dikaitkan dengan identitas nasional yang dipolitisasi. Masalah identitas nasional memiliki berbagai tingkat keterkaitan dengan supraidentitas seperti Pan-Arabisme atau Pan-Islamisme. Bahasa dan kebudayaan dilembagakan dan digunakan sebagai *platforms* untuk legitimasi politik.

Kasus di Algeria itu menunjukkan bahwa dua isu legitimasi politik dan identitas nasional saling bersinggungan. Konstruksi dan rekonstruksi identitas nasional yang melibatkan bahasa dan budaya berfungsi sebagai sumber daya legitimasi politik dan sebagai tujuan pembentukan kebijakan negara seperti program arabisasi. Negara berupaya memonopoli ekspresi identitas nasional dengan mengontrol ekspresi kebudayaan dan mbingkai pemahaman historis tentang peristiwa nasional. Ancangan *top-down* rezim otoriter tentang isu bahasa dan kebudayaan pada tahun 1960-an, 1970-an, and 1980-an hanya menyisakan sedikit ruang bagi kelompok minoritas untuk ikut menyusun agenda nasional, termasuk merekonstruksi identitas atas dasar saling pengakuan. Kritik dan protes yang disampaikan kepada pemerintah dibungkam dengan tuduhan “upaya neokolonial yang berupaya merusak stabilitas kesatuan nasional.” Pluralitas nasional dipandang sebagai kelemahan yang akan meruntuhkan negara Algeria.

Pada dasarnya, kalau dicermati, negara Algeria sangat memimpikan “satu agenda nasional dalam hal bahasa dan kebudayaan” dalam dua latar kebudayaan, yaitu latar Arab dan Berber. Sayangnya, latar



Berber dianggap tidak ada sehingga rezim yang berkuasa sejak awal kemerdekaan tidak mengajak kelompok Berber untuk mengonstruksi identitas nasional mereka. Karena itu, isu bahasa dan kebudayaan menjadi isu terpenting dalam setiap konflik di Algeria seperti halnya negara-negara Arab pascakolonial, misalnya negara Irak.

#### KERAGAMAN BAHASA SEBAGAI SUMBER KONFLIK?

Contoh kedua kasus di atas menunjukkan bahwa konflik dalam upaya mengonstruksi identitas nasional terjadi manakala terdapat keragaman bahasa. Hal itu menimbulkan pertanyaan: apakah keragaman bahasa merupakan sumber konflik? Menurut Even-Zohar (1997: 3), keragaman bahasa itu sendiri tidak menimbulkan konflik. Dia mencontohkan situasi kebahasaan di Paraguay. Di sana ada hubungan harmonis antara bahasa Guarani, bahasa Indian yang secara praktis tiap orang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bahasa Spanyol, yang hanya menjadi bahasa resmi negara dan masyarakat. Tidak ada seorang pun yang mencoba untuk membakukan bahasa Guarani dan mentransformasi ke dalam bahasa resmi Paraguay.

Identitas Paraguay tentu saja dirasakan secara kuat oleh penduduk Paraguay. Akan tetapi, hal itu tidak dimanifestasikan melalui persaingan antara bahasa Spanyol dengan bahasa Guarani. Ini adalah situasi diglosia yang dianggap paling ideal; pembagian peran yang sempurna antara dua bahasa yang berbeda pada masyarakat yang sama dan pada wilayah yang sama pula. Guarani merupakan bahasa keseharian, sedangkan bahasa Spanyol merupakan bahasa resmi, bahasa negara, yang memiliki ragam bahasa tulis.

Pada sisi lain, ketika sebuah kelompok hendak menegaskan identitas yang berbeda dengan liyan demi kebangsaan atau nasionalitas karena faktor lain, bahasa yang sama pun dapat dipecah sedemikian rupa dan ditransformasi ke dalam wahana perjuangan yang penuh kuasa.

Hal itu tampak dalam kasus bahasa Hindi versus Urdu di India. Perbedaan antara kedua bahasa itu sangat sedikit. Bahkan, dalam Crystal (1994: 172—173; ) disebutkan bahwa *”There is little structural difference between Hindi and Urdu, and the two varieties are often grouped together under the single label Hindi/Urdu, sometimes abbreviated to Hirdu, and formerly often called Hindustani.”*

Namun, ada jarak kebudayaan di antara kedua komunitas bahasa tersebut. Hindi menjadi ragam bahasa yang digunakan kaum Hindu, sedangkan Urdu merupakan ragam bahasa yang digunakan kaum Muslim, terutama sebagai bahasa religi di samping bahasa Arab. Perbedaan terbesar di antara kedua bahasa tersebut adalah dalam hal tulisan, yaitu Hindi ditulis dalam alfabet Dewanagari, sedangkan Urdu ditulis dalam alfabet Arab Persia. Akan tetapi, ketika ideologi sebagai kelompok muslim yang terpisah muncul di India Utara, bahasa Urdu menjadi wahana ideologi itu. Dalam rangka membuat bahasa Urdu sebagai wahana perjuangan yang lebih meyakinkan untuk identitas nasional, yang terpisah atas penutur Hindi dan Hindustani dan para pemeluk Hindu, komunitas bahasa Urdu mulai mengubah bahasa mereka sedikit demi sedikit.

Padahal, kedua komunitas bahasa itu dapat saling memahami secara sempurna dalam bahasa lisan, bahkan jika orang yang dapat menulis dalam dua alfabet (Arab dan Dewanagari), mereka akan dapat menulis dan membaca secara sempurna dalam kedua bahasa itu. Akan tetapi, untuk membuat kedua bahasa itu sebagai wahana yang penuh kuasa dalam konflik identitas, keduanya mengubah bahasa mereka. Hasilnya ialah komunitas bahasa Hindi mengadopsi lebih banyak unsur dari bahasa Sanskerta, menciptakan kata-kata baru berdasar bahasa Sanskerta, dan "membersihkan" diri dari unsur-unsur bahasa Arab dan Persia. Sementara itu, komunitas bahasa Urdu berbuat sebaliknya, yakni mengadopsi lebih dan lebih banyak lagi kosakata Arab dan Persia serta "membersihkan" diri sebanyak mungkin dari pengaruh bahasa Sanskerta. Seseorang yang mengetahui bahasa Hindi dan sedikit bahasa Arab akan dapat dengan mudah memahami bahasa Urdu tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Namun, komunitas Hindi juga terus dan masih terus membentuk kata-kata baru hanya demi berbeda dengan komunitas Urdu (Even-Zohar 1997: 6).

Hal yang sama terjadi pada komunitas bahasa Serbo-Kroasia (Barbour 2000: 12; Crystal 2000: 8-9). Nama Serbo-Kroasia sebelumnya digunakan sebagai nama satu bahasa yang menaungi serangkaian dialek atau ragam bahasa yang digunakan di negara Yugoslavia. Akan tetapi, setelah runtuhnya Yugoslavia dan terjadi konflik bersenjata, sekarang bahasa tersebut memiliki tiga nama, yaitu bahasa Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Mereka menganggap ketiganya sebagai bahasa yang berbeda.

Ciri kebahasaan pun digunakan sedemikian rupa untuk membedakan satu dengan yang lain karena faktor agama dan mereka melihat diri mereka sendiri sebagai kelompok etnis yang berbeda.<sup>9</sup>

Contoh kasus Hindi versus Urdu dan juga Serbia versus Kroatia di atas menarik karena dalam kondisi ketiadaan keragaman bahasa, justru sebuah komunitas menciptakan keragaman itu. Ragam bahasa diciptakan untuk mempertegas bangunan perbedaan secara teleologis. Variasi bahasa sekecil apa pun bisa diciptakan dan bisa sangat signifikan untuk menunjukkan afiliasi seseorang pada kelompok tertentu atau afiliasi kelompok pada agama tertentu, yang sekaligus digunakan sebagai pembatas antara diri dengan liyan. Jadi, hal ini bukan karena keragaman bahasa yang memunculkan konflik, melainkan konflik nasional memunculkan keragaman bahasa atau bahkan kelompok tertentu dalam negara memobilisasi keragaman bahasa demi konflik.

Berbagai contoh di atas menunjukkan bahwa konflik yang melibatkan bahasa dapat terjadi pada komunitas yang monolingual maupun multilingual. Pada wilayah multilingual, konflik bahasa terjadi karena adanya kontak bahasa yang menyebabkan terjadinya bahasa kontak, yang disertai perubahan sistem sosial ketika ada kontak antarkelompok yang berbeda, baik kelompok berdasar etnisitas, kelas sosial, maupun agama.

Sebagian besar konflik bahasa yang terjadi dewasa ini merupakan hasil dari perbedaan status sosial dan perlakuan istimewa terhadap bahasa dominan oleh pemerintah. Nedle (1997: 290) memberikan contoh situasi di Belgia dan Prancis. Kelompok bahasa dominan (bahasa Prancis di Belgia dan bahasa Inggris di Kanada) mengontrol otoritas penting dalam bidang administrasi, politik, dan ekonomi serta memberikan pekerjaan kepada pelamar yang memiliki kemampuan dalam bahasa dominan. Kelompok bahasa yang tidak diuntungkan kemudian memilih untuk meninggalkan ambisi sosialnya, berasimilasi, atau bahkan melakukan perlawanan. Ketika komunitas bahasa secara jumlah atau secara psikologis lemah atau dilemahkan, komunitas tersebut cenderung menuju asimilasi--secara jumlah dalam masyarakat

---

<sup>9</sup> Penjelasan lebih lanjut tentang persinggungan bahasa, agama, etnisitas, dan nasionalisme di Balkan dapat dibaca dalam tulisan Cathie Carmichael berjudul "A People Exists and that People has Its Language: Language and Nationalism in the Balkans," dalam Stephen Barbour dan Cathie Carmichael (2000).

modern kecenderungan ini lebih kuat. Kelompok bahasa yang lebih homogen yang memiliki nilai tradisional, seperti sejarah dan kebudayaan mereka sendiri, lebih memilih melakukan penolakan politis--bentuk umum dari konflik bahasa yang terorganisasi pada abad ini. Konflik ini menjadi begitu mencolok ketika hal itu terjadi antara kelompok populasi yang berbeda secara struktur sosioekonomi (pinggiran/kota, miskin/sejahtera, asli/pendatang) dan kelompok dominan memerlukan bahasanya sendiri sebagai syarat untuk integrasi dari kelompok yang lemah atau dilemahkan. Dalam kasus seperti ini, ada ketakutan agama, sosial, ekonomi, atau psikologis serta rasa frustrasi pada kelompok lemah yang mudah menyulut terjadinya konflik.

Konflik bahasa pada umumnya juga disebabkan oleh upaya bagian dari kelompok dominan menghalangi mobilitas sosial. Akibatnya, para politisi, pemimpin ekonomi, aktivis, dari kelompok yang merasa terhalangi mobilitasnya, menjadikan bahasa sebagai sebuah simbol pergerakan untuk menelusup lebih jauh dalam konflik karena masalah ekonomi, sosial, dan politik. Jadi, konflik dapat terjadi antarkomunitas bahasa berdasar ketidakseimbangan sosial, relijiusitas, dan kelompok etnis. Dalam situasi ketidakseimbangan itulah bahasa dapat dipolitisasi.

## PENUTUP

Jika ada komunitas bahasa yang bahasanya berkaitan dengan komunitas bahasa lain, tetapi kedua komunitas bahasa itu kurang dapat memahami satu sama lain, mereka akan dapat menerima bahwa bahasa yang mereka gunakan merupakan dialek dari satu bahasa yang sama karena mereka merasa berbagi identitas nasional atau etnik. Sebaliknya, penutur dari dialek yang berkaitan dan dapat saling memahami satu komunitas bahasa dengan komunitas bahasa lain, dapat menyatakan diri bahwa mereka berbicara dalam bahasa yang terpisah atau berbeda jika kedua kelompok tersebut termasuk ke dalam kelompok etnis atau bangsa yang terpisah. Kelompok-kelompok ini dapat menamai ragam bahasanya sendiri-sendiri sesuai dengan kelompok yang mereka konstruksi. Artinya, bahasa dapat berfungsi sebagai penanda penyatuan atau pemisahan satu kelompok atas kelompok lain.

Agama, kelompok etnis, dan kelompok sosial menjadi bagian penting dalam pembentukan kesadaran kebahasaan dan turut membangkitkan

kesadaran pentingnya menjadikan bahasa sebagai simbol perjuangan dan pemisah antarkelompok dalam situasi konflik. Jika kelompok-kelompok tersebut berusaha mengonstruksi bangsa dan berlanjut pada pemisahan diri sebagai negara, bahasa pada umumnya akan dikodifikasi sebagai identitas nasional.

Bahasa itu sendiri bukanlah sumber konflik, baik dalam masyarakat monolingual maupun multilingual. Dominasi kelompok tertentu dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik sehingga menimbulkan ketidakpuasan pada kelompok lain merupakan pemicu konflik, yang dapat dipertegas melalui konflik bahasa. Meluasnya konflik ke aspek kebahasaan pada umumnya juga terjadi karena buruknya perencanaan bahasa dan kebijakan bahasa yang diambil pemerintah sehingga membuka jalan bagi kelompok minoritas untuk melakukan perlawanan. Artinya, diskriminasi terhadap hak bahasa kelompok tertentu dapat menggelorakan konflik.

Pada tataran nasional, Indonesia adalah negara yang paling beruntung karena dijadikannya bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas nasional dalam pembentukan negara-bangsa tidak menimbulkan konflik. Akan tetapi, riak-riak konflik itu kini bermunculan di daerah akibat dijadikannya bahasa etnik tertentu sebagai materi muatan lokal dalam kurikulum di sekolah. Pemilihan bahasa etnik tertentu—biasanya bahasa dominan—menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penutur bahasa minoritas. Bahkan, seringkali terjadi pemaksaan agar anak-anak dari komunitas bahasa minoritas mempelajari bahasa etnik tertentu sebagai muatan lokal hanya karena mereka bertempat tinggal, yang secara administratif masuk ke dalam wilayah komunitas bahasa dominan. Riak-riak konflik kebahasaan antarkomunitas pengguna dialek dari satu bahasa yang sama secara linguistik juga mulai tampak ketika terjadi pembakuan bahasa etnik di daerah.

#### PUSTAKA ACUAN

- Barbour, Stephen. 2000. "Nationalism, Language, Europe," dalam Stephen Barbour dan Cathie Carmichael (ed.). *Languages and Nationalism in Europe*. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 1—17.
- Carmichael, Cathie. 2000. "A People Exists and that People has Its Language: Language and Nationalism in the Balkans," dalam Stephen Barbour dan Cathie Carmichael (ed.). *Languages and Nationalism in Europe*. Oxford: Oxford

- University Press. Hlm. 221—240.
- Chilton, Paul A. 1998. "The Role of Language in Human Conflict: Prolegomena to the Investigation of Language as a Factor in Conflict Causation and Resolution," dalam Sue Wright (ed.). *Language and Conflict: A Neglected Relationship*. Philadelphia: Multilingual Matters Ltd.
- Crystal, David. 1994. *An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages*. London: Penguin Books.
- Crystal, David. 2000. *Language Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dwyer, Arienne M. 2005. *The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse*. Washington: the East-West Center Washington.
- Even-Zohar, Itamar. 1997. "Language Conflict and Identity." Paper presented to The Reuben Hecht Chair of Zionism conference "Language and Nation", The University of Haifa, January 23 1985. Subsequently published under the title "Language Conflict and National Identity" in Joseph Alpher ed. 1986. *Nationalism and Modernity: A Mediterranean Perspective*. New York: Praeger & Haifa: Reuben Hecht Chair. Hlm. 126--135.
- Fishman, Joshua A. 1972. *Advances in the Sociology of Language*. Vol. 2. The Hague: Mouten.
- Fishman, Joshua A. 1991. *Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages*. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
- Handoko, Fransisca. 2010. "Perjalanan Bahasa Mandarin dalam Pendidikan di Indonesia," dalam dalam Mikihiro Moriyama dan Manneke Budiman (ed.). *Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 355—371.
- Haugen, Einar. 1966. *Language Conflict and Language Planning: The Case of Modern Norwegian*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Holmes, Janet. 1997. *An Introduction to Sociolinguistics*. London: Longman.
- Holt, Mike, 1994. "Algeria: Language, Nation and State," dalam Yasir Suleiman (ed.). *Arabic Sociolinguistics: Issues and Perspectives*. Richmond: Curzon. Hlm. 25—41.
- Holt, Mike, 1996. "Divided Loyalties: Language and Ethnic Identity in the Arab World," dalam Yasir Suleiman, (ed). *Language and Identity in the Middle East and North Africa*. Richmond: Curzon. Hlm. 11—23.
- Kitamura, Yumi. 2010. "Pemakaian dan Perubahan Bahasa Cina dalam Linguistic Landscape di Jakarta," dalam Mikihiro Moriyama dan Manneke Budiman (ed.). *Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 372—404.
- Maalouf, Amin. 2001. *In The Name of Identity: Violence and the Need to Belong*. First North American Edition. Diterjemahkan dari Bahasa Prancis oleh Barbara Bray. New York: Arcade Publishing.

- Mouhleb, Naima. 2005. "Language and Conflict: Kabylia and The Algerian State." MA Thesis in Arabic, Program for African & Asian Studies, Institute for Culture Studies & Oriental Languages, University of Oslo; Centre for the Study of Civil War (CSCW) International Peace Research Institute, Oslo (PRIO)
- Nedle, Peter Hans. 1997. "Language Conflict," dalam Florian Coulmas (ed.). *The Handbook of Sociolinguistics*. Massachussets: Blackwell. Hlm. 273—283.
- Smith, Dan. 1998. "Language and Discourse in Conflict and Conflict Resolution," dalam Sue Wright (ed.). *Language and Conflict: A Neglected Relationship*. Philadelphia: Multilingual Matters Ltd.
- Suleiman, Yasir, 1999. "Language and Political Conflict in the Middle East: A Study in Symbolic Sociolinguistics," dalam Yasir Suleiman, (ed). *Language & Society in the Middle East & North Africa*. Richmond: Curzon. Hlm.10–37.
- Suleiman, Yasir, 2004. *A War of Words: Language and Conflict in the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thung Ju Lan. 2010. "Orang Cina dalam Bahasa Politik Orde Baru," dalam Mikihiro Moriyama dan Manneke Budiman (ed.). *Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 275—305.
- Thornborrow, Joanna. 1999. "Language and Identity," dalam Linda Thomas dan Shan Wareing (eds.). *Language, Society and Power*. New York: Routledge. Hlm. 223—251.
- Tilmatine, Mohamed & Yasir Suleiman. 1996. "Language and Identity: The Case of the Berbers," dalam Yasir Suleiman, (ed). *Language and Identity in the Middle East and North Africa*. Richmond: Curzon. Hlm. 165–179.
- Trudgill, Peter. 1995. *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society*. Revised Edition. London: Penguin Books.
- Tsuda, Koji. 2010. "Etnis Tionghoa yang Belajar Bahasa Mandarin," dalam Mikihiro Moriyama dan Manneke Budiman (ed.). *Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 306—354.